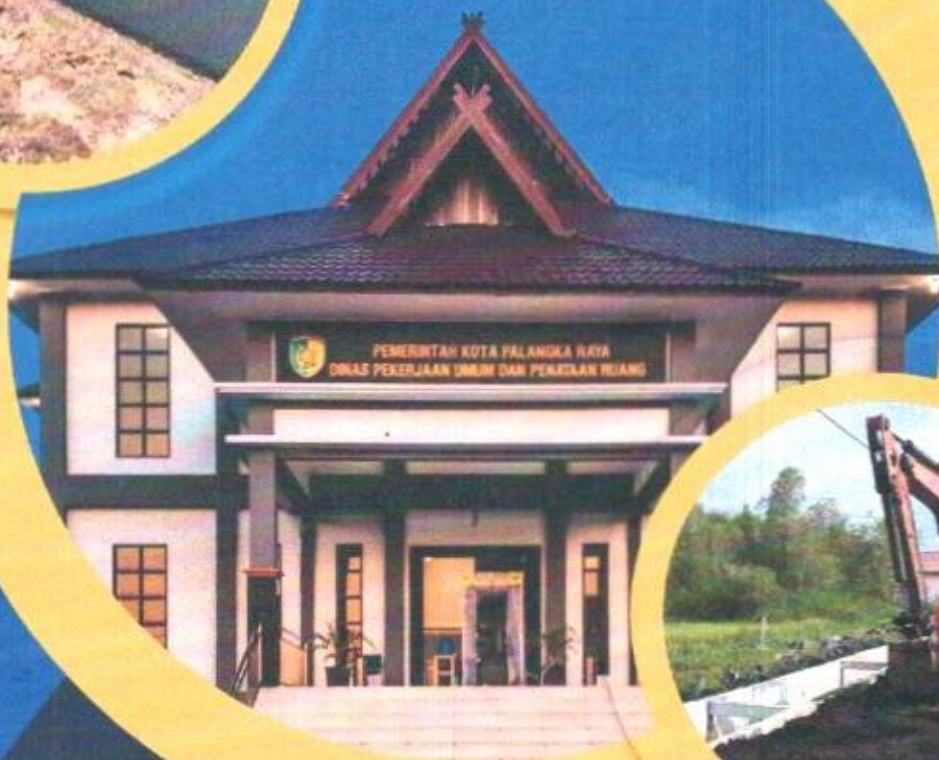
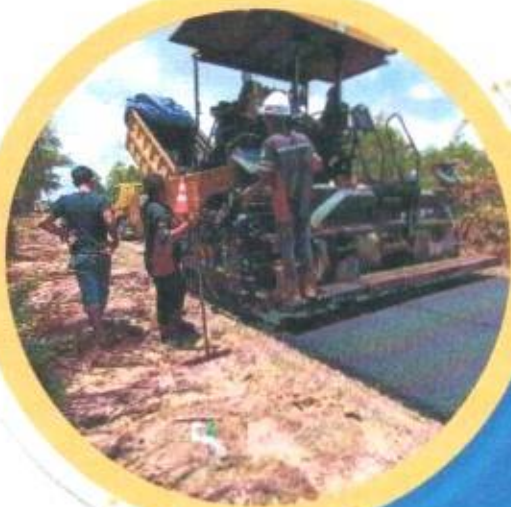




**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PALANGKA RAYA**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2022



**Jalan G. Obos XI Komplek Perkantoran | Telepon (0536) 4256955
Website: www.pupr.palangkaraya.go.id | E-mail: pupr@palangkaraya.go.id
Instagram: [dinasuprkotapraya](https://www.instagram.com/dinasuprkotapraya) | Palangka Raya 73111**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai dan sebagai upaya perbaikan kesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Akhirnya, diharapkan laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja di waktu yang akan datang dapat lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan dan koordinasi pelaksanaannya.

Palangka Raya, Januari 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Palangka Raya



ARBERT TOMBAK, S.E.,M.A.P.

Pembina Utama Muda
NIP. 19671209 199703 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ Badan Hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Seluruh program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Untuk mengukur nilai akhir dari hasil evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kota Palangka Raya Tahun 2022 dapat dilihat pada :

1. Rencana Strategis
2. Rencana Kinerja Tahunan
3. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Pencapaian kinerja pada Tahun 2022 dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta hasil dari pembangunan ini telah dapat dirasakan oleh masyarakat. Semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk dijadikan tolok ukur dalam peningkatan kinerja di masa mendatang.

Palangka Raya, Januari 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Palangka Raya



ARBERT TOMBAK, S.E.,M.A.P.

Pembina Utama Muda
NIP. 19671209 199703 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
 Bab I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Isu Strategis	7
D. Sistematika Penulisan	8
 Bab II PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. Perencanaan Strategis.....	9
1. Visi	10
2. Misi	10
3. Tujuan dan Sasaran	10
4. Strategi dan Arah Kebijakan	11
5. Rencana Aksi	13
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	18
 Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	20
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	21
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	22
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)	23
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	23
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	25
7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	26
B. Realisasi Anggaran	31
 Bab IV PENUTUP	39

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan	3
Tabel	1.2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	4
Tabel	1.3.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pejabat Eselon dan Fungsional	5
Tabel	1.4.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang	5
Tabel	1.5.	Aset Yang Dikelola Dinas PUPR Kota Palangka Raya	6
Tabel	1.6.	Jumlah APBD Perubahan Yang Dikelola Dinas PUPR	7
Tabel	2.1.	Tujuan dan Sasaran	10
Tabel	2.2.	Strategi dan Arah Kebijakan.....	12
Tabel	2.3.	Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2022	14
Tabel	2.4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	18
Tabel	2.5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022	19
Tabel	3.1.	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022	20
Tabel	3.2.	Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Jangka Menengah	22
Tabel	3.3.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022	25
Tabel	3.4.	Analisis Kebutuhan Sumber Daya	26
Tabel	3.5.	Analisis SWOT	29
Tabel	3.6.	Capaian Program Prioritas Tahun 2022	30
Tabel	3.7.	Realisasi Anggaran Belanja Perubahan Tahun 2022	32
Tabel	3.8.	Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajibannya. Perbaikan tata kelola pemerintahan merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem pemerintahan yang berfokus pada peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang diimplementasikan oleh masing-masing instansi pemerintah, hal ini berarti instansi pemerintah merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi.

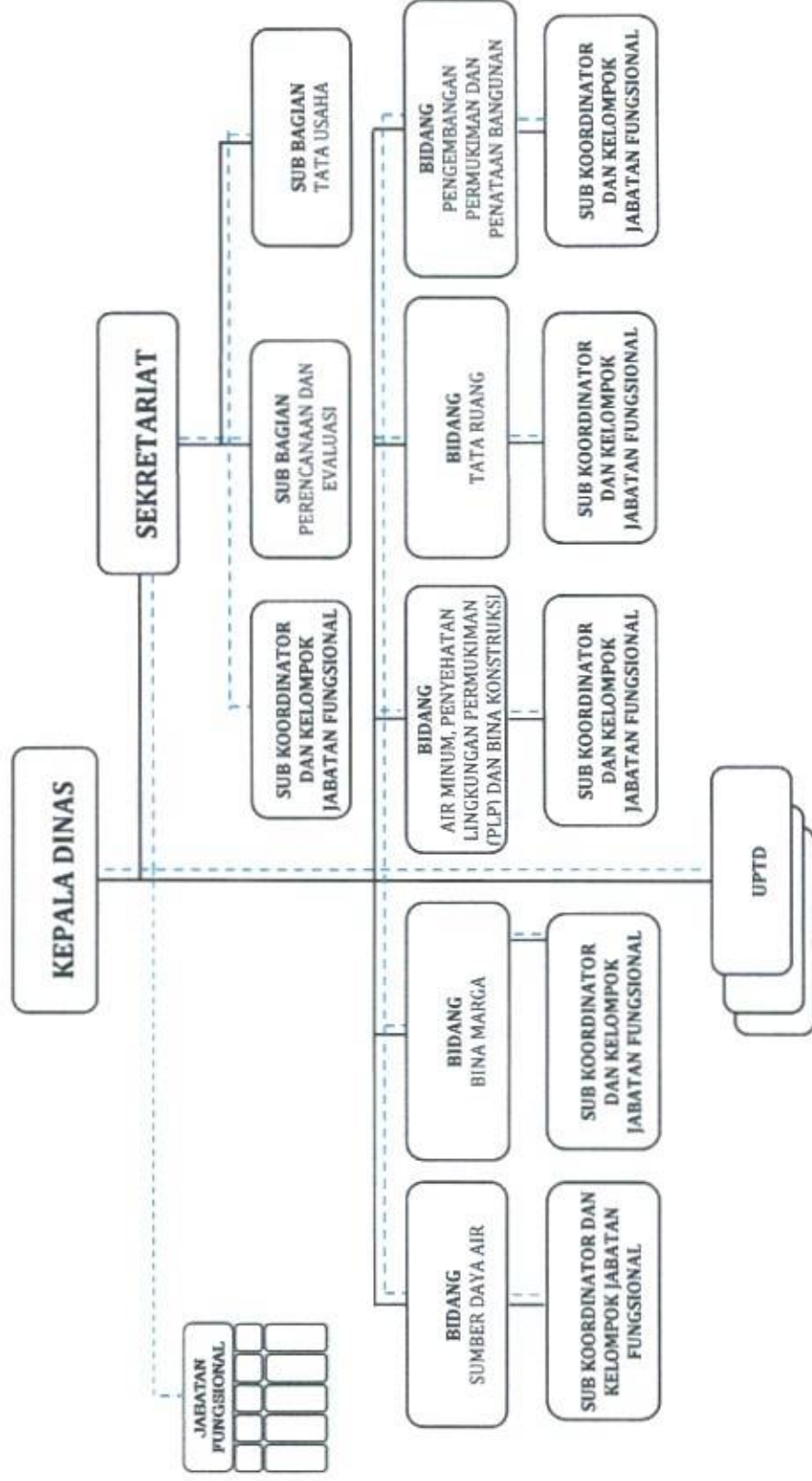
Guna mewujudkan kinerja pelayanan tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya membentuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai suatu bagian dari sistem organisasi Pemerintahan Kota Palangka Raya memiliki tugas dan fungsi yang tidak terlepas dari kewenangan-kewenangan yang menjadi tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 48 Tahun 2021 ditetapkan dengan Tipe A, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat Dinas, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 2. Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Bidang Sumber Daya Air;
- d. Bidang Bina Marga;
- e. Bidang Air Minum, Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) dan Bina Konstruksi;
- f. Bidang Tata Ruang;
- g. Bidang Pengembangan Permukiman dan Penataan Bangunan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. Kelompok Jabatan Pelaksana

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PALANGKA RAYA
(Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 48 Tahun 2021)**



Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya sampai akhir Tahun 2022 didukung Sumber Daya Manusia sebanyak 65 orang yang dapat dikelompokkan menurut tingkat pendidikan; jenis kelamin; pejabat eselon dan fungsional; pangkat dan golongan ruang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

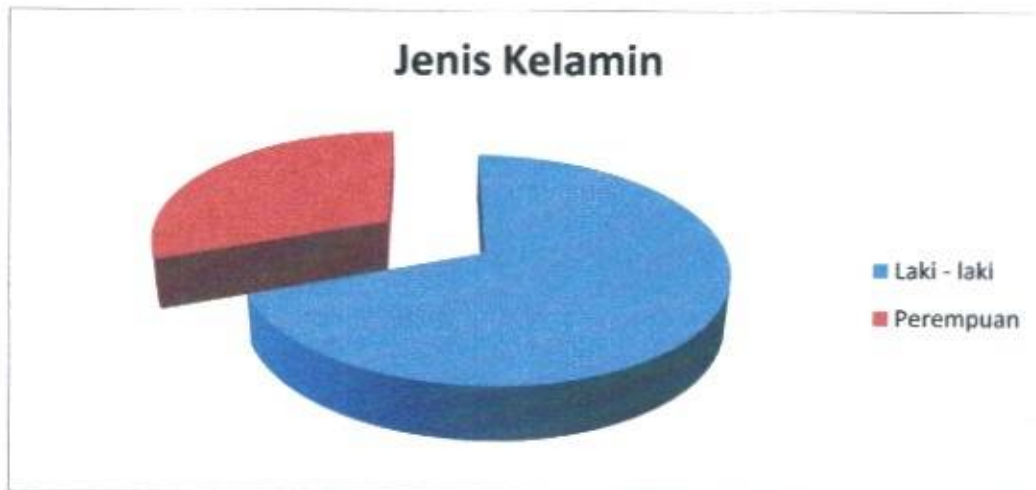
Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan

Tingkat Pendidikan		Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	SD	-	-	-	-	-
2	SMP	-	-	-	-	-
3	SMA/D-2	-	4	3	-	7
4	D-3	-	-	6	-	6
5	D-4/S-1	-	-	41	3	44
6	S-2	-	-	4	4	8
7	S-3	-	-	-	-	-
Total						65



Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

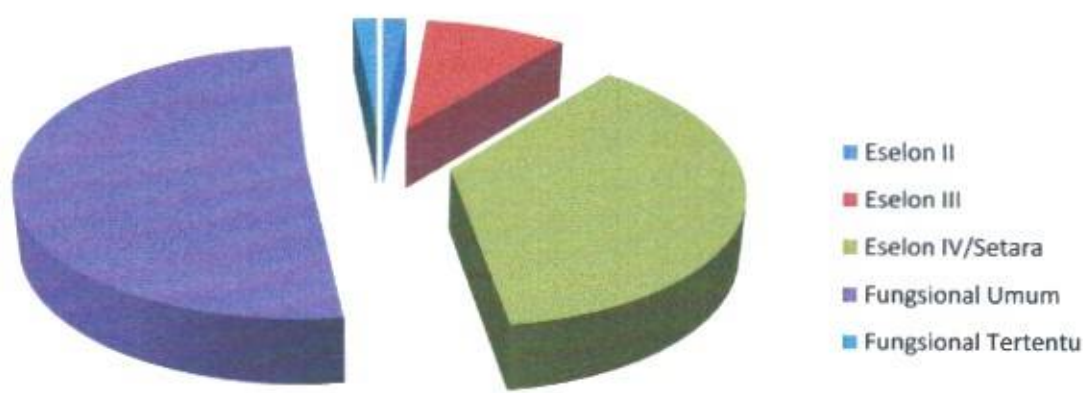
Jenis Kelamin		Jumlah
1	Laki - laki	45
2	Perempuan	20
Total		65



Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pejabat Eselon dan Fungsional

Eselon / Pelaksana		Golongan								Jumlah
		SD	SMP	SMA	D - 3	D - 4	S - 1	S - 2	S - 3	
1	Eselon II	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Eselon III	-	-	-	-	-	3	3	-	6
3	Eselon IV/Setara	-	-	-	-	1	19	4	-	24
4	Fungsional Umum	-	-	7	6	-	20	-	-	33
5	Fungsional Tertentu	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Total		-	-	7	6	1	43	7	-	65

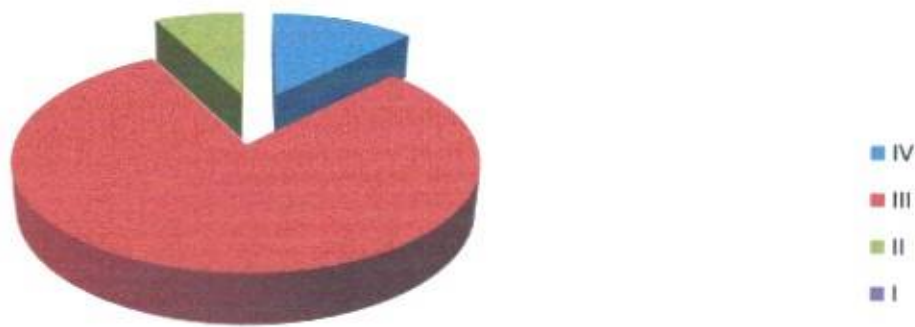
Pejabat Eselon dan Fungsional



Tabel 1.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

Pangkat	Golongan	Jumlah
II	c	-
	d	5
III	a	6
	b	6
	c	22
	d	18
IV	a	7
	b	-
	c	1
Total		65

Pangkat dan Gol. Ruang



Aset yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya sampai akhir Tahun 2022 berdasarkan Buku Induk Inventaris dalam pelayanan masyarakat berupa kantor, kendaraan dinas/kendaraan operasional dan perlengkapan kantor dengan rincian aset, yang terlihat pada Tabel 1.5. Sisanya adalah aset tanah dan infrastruktur yang merupakan infrastruktur publik.

Tabel 1.5. Aset Yang Dikelola Dinas PUPR Kota Palangka Raya

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah (Unit)
1	Gedung kantor	2
2	Gedung aboratorium/Gudang alat	1
3	Kendaraan dinas/kendaraan operasional roda 4	10
4	Kendaraan dinas roda 2	2
5	Alat berat	16
6	Meja	94
7	Kursi	401
8	Lemari	91
9	A C	52
10	Brankas	1
11	LCD Proyektor	6
12	Sound System	2
13	Komputer	50
14	Laptop	48
15	Printer	100
16	UPS	37
17	Mesin tik	10
18	Kamera	20
19	Mesin potong rumput	6
20	Handy Talky	6
21	G P S	11
22	Theodolite	3
23	Alat ukur laser	4
24	Penghancur kertas	8
25	Genset	1
26	Drone	5
27	Meteran dorong	1
28	Kompas	1
29	Apar	16
30	Echo Sounder	1
31	Rumah genset	1
32	Rumah jaga	1
33	Scanner	4
34	Mesin absensi	2
35	CCTV	1
36	Laci	28
37	Notebook	3
38	Tangga	1
39	Alat ukur / water pass	1
40	Tripod	2
41	Web cam	2
41	Meja makan besar	1
42	Meja makan kecil	4
43	Kompor gas	1
44	Lemari es	1

45	Coffe maker	1
46	Exhouse gas analyzer	1
47	Bak cuci piring	1
48	Mini bar	1
49	Meja kitchen set	1
50	LED Videotron Indoor	1
52	Kamera Digital	1
53	Peralatan Rapat Daring	1

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya, mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan sebesar Rp. 201.955.911.654,-

TABEL 1.6.
JUMLAH APBD PERUBAHAN YANG DIKELOLA DINAS PUPR

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)
4	PENDAPATAN	4.689.000.000
4.1	Pendapatan Asli Daerah	4.689.000.000
4.1.02	Hasil Restribusi Daerah	4.689.000.000
5	BELANJA	201.955.911.654
5.1	BELANJA OPERASI	29.976.637.395
5.1.01	Belanja Pegawai	8.094.905.796
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.881.731.599
5.2.	BELANJA MODAL	171.979.274.259
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.137.117.080
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.627.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	152.215.157.179

C. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis ini merupakan tantangan yang harus dijawab untuk terwujudnya Kota Palangka Raya menjadi kota yang maju, rukun dan sejahtera untuk semua, dimana yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah menyangkut masalah infrastruktur dan penataan ruang. Ada beberapa isu strategis yang menjadi bahan kajian, diantaranya adalah :

1. Banyaknya ruas jalan kota yang kondisinya rusak/rusak berat dan tidak meratanya pembangunan infrastruktur jalan/jembatan pada semua kecamatan
2. Buruknya sistem drainase perkotaan

3. Penanganan infrastruktur tidak terfokus hingga tuntas.
4. Perbaikan manajemen tata ruang

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu